

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Kondisi Penyerapan Tenaga Kerja, Konsumsi Masyarakat, Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi

Pada subbab ini membahas kondisi penyerapan tenaga kerja, konsumsi masyarakat, inflasi dan indeks pembangunan manusia di provinsi jambi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai bagaimana kondisi faktor-faktor tersebut mempengaruhi pembangunan di provinsi Jambi. Penyerapan tenaga kerja di provinsi jambi menjadi perhatian utama, karena banyaknya orang yang bekerja dapat menggambarkan bagaimana taraf hidup dan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Di sisi lain, konsumsi masyarakat diharapkan dapat memicu perusahaan untuk meningkatkan produksi mereka yang kemudian akan membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat diserap. Selain itu, inflasi memiliki dampak penting terhadap peningkatan biaya produksi barang dan jasa yang dapat mempengaruhi konsumsi masyarakat. Selain itu, indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai indicator kemajuan kualitas hidup masyarakat menjadi tolak ukur penting dalam keberhasilan pembangunan di provinsi jambi. Adapun hasil analisis kondisi pada setiap variabel penelitian sebagai berikut :

5.1.1 Kondisi Konsumsi Masyarakat di Provinsi Jambi

Menurut McConnell (2005), konsumsi masyarakat adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk durable goods, yaitu barangbarang konsumsi yang bersifat tahan lama (mobil, kulkas, televisi, dsb.), nondurable goods, yaitu barang-barang konsumsi yang bersifat tidak tahan lama (makanan, minuman, dsb.), serta expenditure for services, yaitu penggunaan jasa (dokter, montir, pengacara, dll.).

Seluruh kegiatan yang melibatkan konsumsi oleh masyarakat dicatatkan dalam PDRB sebagai konsumsi masyarakat. Diasumsikan bahwa apabila konsumsi masyarakat tinggi maka perekonomian dianggap baik dikarenakan masyarakat

memiliki daya beli tinggi sehingga dapat mengonsumsi barang dan/atau jasa dalam jumlah besar. Kondisi konsumsi masyarakat di Provinsi Jambi selama tahun 2017-2023 dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1 Konsumsi Masyarakat Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2023 (Ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun							Rata - rata
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Batang Hari	2.555.991	2.653.926	2.739.370	2.964.202	3.076.814	3.186.183	3.292.105	2.924.084
Perkembangan (%)		3,69	3,12	7,58	3,66	3,43	3,22	4,12
Bungo	3.960.252	3.801.254	4.370.917	4.157.090	4.285.224	4.463.174	4.601.113	4.234.146
Perkembangan (%)		-4,18	13,03	-5,14	2,99	3,99	3,00	2,28
Kerinci	2.249.836	2.365.352	2.434.262	2.501.748	2.565.349	2.683.723	2.797.171	2.513.920
Perkembangan (%)		4,88	2,83	2,70	2,48	4,41	4,06	3,56
Merangin	3.685.658	3.884.992	4.010.336	3.639.793	3.692.166	3.831.326	4.040.979	3.826.464
Perkembangan (%)		5,13	3,13	-10,18	1,42	3,63	5,19	1,39
Muaro Jambi	3.430.674	3.655.528	3.856.249	3.439.512	3.590.010	3.763.910	3.989.070	3.674.993
Perkembangan (%)		6,15	5,21	-12,12	4,19	4,62	5,64	2,28
Sarolangun	3.330.915	3.435.103	3.525.890	3.369.801	3.462.131	3.597.768	3.744.862	3.495.210
Perkembangan (%)		3,03	2,57	-4,63	2,67	3,77	3,93	1,89
Tanjung Jabung Barat	2.903.790	3.084.378	3.185.072	3.009.900	3.109.499	3.234.616	3.380.684	3.129.706
Perkembangan (%)		5,85	3,16	-5,82	3,20	3,87	4,32	2,43
Tanjung Jabung Timur	1.820.930	1.944.633	2.022.240	2.074.174	2.123.983	2.225.602	2.342.856	2.079.203
Perkembangan (%)		6,36	3,84	2,50	2,35	4,57	5,00	4,10
Tebo	3.372.376	3.582.195	3.741.747	3.508.365	3.595.131	3.697.980	3.821.615	3.617.058
Perkembangan (%)		5,86	4,26	-6,65	2,41	2,78	3,24	1,98
Jambi	6.885.132	7.124.567	7.380.363	7.308.347	7.493.328	7.805.101	8.025.167	7.431.715
Perkembangan (%)		3,36	3,47	-0,99	2,47	3,99	2,74	2,51
Sungai Penuh	862.952	915.721	955.359	989.956	1.022.401	1.065.904	1.100.494	987.541
Perkembangan (%)		5,76	4,15	3,49	3,17	4,08	3,14	3,97
Provinsi jambi	46.684.760	48.402.347	51.146.077	49.057.811	50.508.802	52.546.255	54.648.408	50.427.780
Perkembangan (%)		3,55	5,36	-4,26	2,87	3,88	3,85	3

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data diolah)

Berdasarkan table 5.1, Dari tahun 2017-2023 konsumsi masyarakat di masing-masing Kabupaten/Kota terus mengalami peningkatan namun pada tahun 2020 hampir seluruh Kabupaten/Kota mengalami penurunan. Pada tahun 2017, Provinsi Jambi mencatat konsumsi masyarakat sebesar 46.684.760 Ribu Rupiah, kemudian angka ini mengalami peningkatan hingga tahun 2019 sebesar 8,91 persen menjadi 51.146.077

Ribu Rupiah di tahun 2018, namun di tahun berikutnya mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 4,26 persen menjadi 49.057.811 Ribu Rupiah, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 54.648.408 Ribu Rupiah.

Pada tahun 2018 juga, Kabupaten Bungo menjadi satu-satunya Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan konsumsi masyarakat dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh tekanan harga komoditas seperti sawit dan karet. Karena Bungo tergantung pada sektor ini, pendapatan rumah tangga tak tumbuh pesat langsung mempengaruhi pengeluaran per kapita yang berarti konsumsi masyarakat juga ikut mengalami penurunan. Selain itu, penambahan PDRB per kapita dari sektor lain kurang menggantikan perlambatan di pertanian. Namun penurunan konsumsi masyarakat tersebut pulih pada tahun 2019, yang disebabkan oleh kembali normalnya harga komoditas sawit dan karet yang menjadi sektor utama di Kabupaten Bungo. Hal ini juga diiringi oleh peningkatan jumlah penduduk di tahun tersebut menjadikan Kabupaten Bungo memiliki pertumbuhan konsumsi masyarakat tertinggi di Provinsi Jambi pada tahun 2019.

Rata-rata konsumsi masyarakat tertinggi di Provinsi Jambi selama periode 2017-2023 terdapat di Kota Jambi yaitu sebesar 7.431.715 Ribu Rupiah dengan rata-rata perkembangan 2,51 persen. Selanjutnya diikuti dengan Kabupaten Bungo dengan rata-rata konsumsi masyarakat sebesar 4.234.146 Ribu Rupiah dan rata-rata perkembangan sebesar 2,28 persen. Rata-rata konsumsi terendah di Provinsi Jambi periode 2017-2023 terdapat di Kota Sungai Penuh yaitu 987.541 Ribu Rupiah dan rata-rata penurunan sebesar 3,91 persen.

5.1.2 Kondisi Inflasi di Provinsi Jambi

Inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya (Bank Indonesia). Inflasi disebabkan karena berbagai faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya ialah jumlah barang di diminta mengalami kenaikan, peningkatan biaya produksi, dan

peningkatan jumlah uang beredar. Tergantung pada tingkat keparahannya, inflasi dapat berupa : inflasi ringan (Inflasi yang tingkat keparahannya dibawah 10% per tahun), inflasi sedang (inflasi yang keparahannya adalah 10-30% per tahun), inflasi parah (inflasi yang tingkat parahnya adalah 30%-100% per tahun); hingga hiperinflasi (tingkat parahnya inflasi melebihi 100% per tahun). Penyebab inflasi itu adalah peningkatan permintaan atas barang melebihi peningkatan penawaran atau di atas kemampuan memproduksi yang berakibat naiknya harga (Susanto & Pangesti, 2021). Kondisi Inflasi di Provinsi Jambi selama tahun 2017-2023 dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2 Tingkat Inflasi Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2023 (Persen)

Kabupaten/Kota	Tahun							Rata-Rata
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Batang Hari	3,12	2,98	2,85	2,32	2,45	3,12	3,05	2,84
Bungo	4,25	2,46	2,61	2,32	2,45	3,12	3,05	2,89
Kerinci	3,45	3,12	2,98	2,75	2,89	4,21	3,61	3,29
Merangin	3,53	3,86	3,45	2,13	2,44	3,61	3,27	3,18
Muaro Jambi	4,25	2,46	2,61	2,32	2,42	6,35	2,85	3,32
Sarolangun	3,39	3,56	3,71	2,93	2,98	4,11	3,42	3,44
Tanjung Jabung Barat	2,41	2,57	2,89	2,03	2,67	3,97	3,23	2,82
Tanjung Jabung Timur	2,34	2,47	2,67	1,97	2,88	4,05	3,65	2,86
Tebo	3,31	3,02	2,85	2,23	2,54	3,77	3,18	2,99
Jambi	2,68	3,02	1,27	3,09	1,67	5,51	3,27	2,93
Sungai Penuh	2,21	2,67	2,83	3,24	4,33	4,65	3,64	3,37
Provinsi jambi	3,18	2,93	2,79	2,48	2,70	4,22	3,29	3,09

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data diolah)

Berdasarkan table 5.2, Dari tahun 2017-2023 tingkat inflasi di masing-masing Kabupaten/Kota relative stabil. Pada tahun 2017, Provinsi Jambi mencatat tingkat inflasi sebesar 3,18 persen dan hanya terjadi lonjakan yang cukup signifikan di tahun 2022 dengan tingkat inflasi 4,22 persen. Dari tahun 2017-2023, Provinsi Jambi memiliki rata-rata tingkat inflasi sebesar 3,09 persen.

Pada tahun 2019, Kota Jambi menjadi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan tingkat inflasi paling rendah yaitu hanya 1,27 persen. Hal ini terjadi karena kondisi pasokan pangan yang kuat dan strategi pengendalian harga yang efektif. Banyak bulan mencatat deflasi atau inflasi sangat rendah karena pasokan komoditas pangan lokal melimpah seperti cabai merah, bawang merah, ikan nila, daging ayam yang menyebabkan harga turun. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan BI menunjukkan bahwa inflasi di Jambi turun secara struktural, bukan karena gangguan eksternal atau kelemahan ekonomi.

Pada tahun 2022, Kabupaten Muaro Jambi menjadi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan tingkat inflasi paling tinggi yaitu 6,35 persen. Hal ini bisa terjadi karena lonjakan harga pangan seperti cabai, dan bawang merah. Curah hujan tinggi pada Mei–Juni 2022 menyebabkan kualitas dan luas tanam cabai menurun, sehingga pasokan di pasaran berkurang drastis. Ini memicu kenaikan harga cabai dan bawang merah. Hal itu diperparah dengan Pemerintah yang menaikkan harga Peralite dan Solar pada September 2022, yang langsung memicu kenaikan harga yang menyumbang mayoritas inflasi di Provinsi Jambi

Rata-rata tingkat inflasi tertinggi di Provinsi Jambi selama periode 2017-2023 terdapat di Kabupaten Sarolangun yaitu sebesar 3,44 persen. Selanjutnya diikuti dengan Kota Sungai Penuh dengan rata-rata tingkat inflasi sebesar 3,37 persen. Rata-rata konsumsi terendah di Provinsi Jambi periode 2017-2023 terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu 2,82 persen.

5.1.3 Kondisi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi di Provinsi

Jambi

Agar dapat mengetahui kualitas hidup pembangunan manusia, menurut BPS, IPM merupakan ukuran bagaimana kualitas hidup berkembang di suatu daerah. Dalam menentukan bagaimana besarnya tingkatan kualitas pembangunan dalam suatu daerah maka IPM berperan penting untuk mengukur dan melihat sejauh mana pembangunan pada suatu daerah dengan melalui penduduk merasakan atas bentuk dari

suatu pembangunan didaerahnya pada berbagai bidang seperti pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM terdiri dari tiga dimensi utama: gaya hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang memadai atau memadai. IPM didefinisikan sebagai indeks utama dalam tercapainya pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Mereka yang sumber daya manusianya berkualitas baik lebih mungkin untuk mendapatkan pekerjaan. Peningkatan IPM menunjukkan bahwa tingkat aset juga meningkat. (Shafira, 2020). Kondisi indeks pembangunan manusia di Provinsi Jambi tahun 2017-2023 dapat dilihat pada tabel 5.3.

Tabel 5.3 Indeks Pembangunan Manusia Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2023

Kabupaten/Kota	tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Batang Hari	68,92	69,33	69,67	71,34	71,61	71,99	72,5
Bungo	69,04	69,42	69,86	72,46	72,7	73,08	73,57
Kerinci	70,03	70,59	70,95	72,47	72,72	73,24	73,77
Merangin	68,3	68,81	69,07	70,2	70,55	70,98	71,81
Muaro Jambi	67,86	68,34	69,01	70,41	70,79	71,41	72,26
Sarolangun	67,86	69,41	69,72	71,63	72,02	72,66	73,05
Tanjung Jabung Barat	66,15	67,13	67,54	69,62	70,26	70,88	71,44
Tanjung Jabung Timur	62,61	63,32	63,92	67,58	68,09	68,96	69,85
Tebo	68,16	68,67	69,02	70,51	70,73	71,14	71,99
Jambi	69,99	77,41	71,26	72,29	79,94	80,38	80,93
Sungai Penuh	73,75	74,67	75,36	76,02	76,3	76,75	77,2
Provinsi Jambi	68,42	69,74	69,58	71,32	72,34	72,86	73,49

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data diolah)

Berdasarkan tabel 5.3, Dari tahun 2017-2023 IPM masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi terus mengalami peningkatana dari setiap tahunnya . Pada tahun 2017, Provinsi Jambi mencatat IPM sebesar 68,42, kemudian angka ini terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 73,49 persen.

Angka IPM tertinggi di Provinsi Jambi di akhir periode terdapat di Kota Jambi yaitu sebesar 80,93, hal ini disebabkan oleh Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan

dan ekonomi memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan berkualitas dibanding daerah lain di Provinsi Jambi sehingga tingkat partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduknya tinggi. Angka IPM terendah di Provinsi Jambi tahun 2023 terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 69,85. Terdapat empat Kabupaten/Kota dengan IPM diatas rata-rata Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Bungo di angka 73,57, Kabupaten Kerinci di angka 73,77, Kota Jambi di angka 80,93, dan Kota Sungai Penuh di angka 77,2. Terdapat tujuh Kabupaten dengan IPM di bawah rata-rata Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Batang hari di angka 72,5, Kabupaten Merangin di angka 71,78, Kabupaten Muaro Jambi di angka 72,26, Kabupaten Sarolangun di angka 73,05, Kabupaten Tanjung Jabung Barat di angka 71,44, Kabupaten Tanjung Jabung Timur di angka 69,85, dan Kabupaten Tebo di angka 71,99.

5.1.4 Kondisi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi

Penyediaan lapangan kerja merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi, terutama di Indonesia, dimana pertumbuhan angkatan kerja lebih besar dibandingkan pertumbuhan kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi yang semakin meningkat dan membaik akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja disuatu daerah. Ada dua faktor yang mempengaruhi keadaan ketenaga kerjaan yaitu faktor permintaan (dipengaruhi oleh dinamika pembangunan ekonomi) dan faktor penawaran (di tentukan oleh perusahaan struktur penduduk). penerimaan tenaga kerja untuk melakukan tugas (pekerjaan) atau suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan untuk siap diisi oleh para pencari pekerjaan. Secara umum, penyerapan tenaga kerja tersebut menunjukkan seberapa besar suatu perusahaan dalam menyerap tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk. Kemampuan untuk menyerap tenaga kerja berbeda dari satu sektor dengan sektor lainnya (Sumarsono, 2009). Kondisi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi selama tahun 2017-2023 dapat dilihat pada tabel 5.4.

**Tabel 5.4 Penyerapan Tenaga Kerja Masing-Masing Kabupaten/Kota di
Provinsi Jambi Tahun 2017-2023 (Persen)**

Kabupaten/Kota	Tahun							Rata - rata
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Batang Hari	96,43	96,13	95,44	95,58	95,74	96,47	96,15	95,99
Perkembangan (%)		-0,31	-0,73	0,14	0,16	0,77	-0,34	-0,05
Bungo	95,11	96,97	96,18	94,06	94,14	94,50	94,77	95,10
Perkembangan (%)		1,91	-0,81	-2,25	0,08	0,38	0,28	-0,07
Kerinci	96,74	97,26	97,38	97,57	97,68	97,37	97,52	97,36
Perkembangan (%)		0,53	0,13	0,20	0,11	-0,32	0,15	0,13
Merangin	95,90	96,53	96,32	95,14	95,17	95,31	95,65	95,72
Perkembangan (%)		0,65	-0,21	-1,24	0,03	0,15	0,35	-0,05
Muaro Jambi	94,61	95,48	94,80	94,57	94,41	94,65	94,60	94,73
Perkembangan (%)		0,91	-0,72	-0,24	-0,16	0,24	-0,05	0,01
Sarolangun	97,75	95,94	95,91	94,29	94,48	94,78	94,91	95,44
Perkembangan (%)		-1,88	-0,03	-1,72	0,21	0,31	0,13	-0,50
Tanjung Jabung Barat	96,93	97,62	97,43	97,84	97,47	97,12	97,05	97,35
Perkembangan (%)		0,71	-0,20	0,41	-0,38	-0,35	-0,08	0,02
Tanjung Jabung Timur	97,64	98,20	98,37	98,59	98,44	98,68	98,33	98,32
Perkembangan (%)		0,58	0,17	0,22	-0,16	0,24	-0,36	0,12
Tebo	95,11	96,97	97,10	97,05	97,17	98,62	98,29	97,19
Perkembangan (%)		1,91	0,13	-0,05	0,13	1,47	-0,34	0,54
Jambi	94,45	93,59	93,47	89,51	89,34	91,05	91,73	91,88
Perkembangan (%)		-0,93	-0,12	-4,43	-0,19	1,88	0,74	-0,51
Sungai Penuh	95,86	94,87	96,00	94,44	97,00	97,51	96,20	95,98
Perkembangan (%)		-1,04	1,17	-1,65	2,64	0,52	-1,36	0,05
Provinsi jambi	96,05	96,32	96,22	95,33	95,55	96,01	95,93	95,91
Perkembangan (%)		0,29	-0,11	-0,93	0,23	0,48	-0,08	-0,02

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data diolah)

Berdasarkan table 5.4, penyerapan tenaga kerja di masing-masing Kabupaten/Kota mempunyai tren yang dinamis. Pada tahun 2017, Provinsi Jambi mencatat penyerapan tenaga kerja sebesar 96,05 persen, kemudian angka ini mengalami peningkatan 0,29 persen di tahun 2018 menjadi 96,32 persen, kemudian di tahun berikutnya mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 95,33 persen,

namun di tahun 2021 penyerapan tenaga kerja kembali meningkat sebesar 0,23 persen dan kembali meningkat di tahun 2022 sebesar 0,48 menjadi 96,01 persen, sayangnya di tahun 2023 angka ini turun kembali menjadi 95,93 persen.

Rata-rata penyerapan tenaga kerja tertinggi di Provinsi Jambi selama periode 2017-2023 terdapat di Kabupaten Tanjung jabung Timur yaitu sebesar 98,32 persen dengan rata-rata perkembangan 0,12 persen. Selanjutnya diikuti dengan Kabupaten Kerinci dengan rata-rata penyerapan tenaga kerja sebesar 97,36 persen dan rata-rata perkembangan sebesar 0,13 persen. Rata-rata penyerapan tenaga kerja terendah di Provinsi Jambi periode 2017-2023 terdapat di Kota Jambi yaitu 91,88 persen dan rata-rata penurunan sebesar 0,51 persen.

5.2 Analisis Pengaruh Konsumsi Masyarakat, Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi Tahun 2017-2023

Rumusan masalah kedua penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana pengaruh dari konsumsi masyarakat, inflasi, dan indeks pembangunan manusia terhadap penyerapan tenaga kerja di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah tersebut menggunakan regresi data panel dengan kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 dan cross sectionnya yaitu 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Adapun hasil pengolahan data panel yaitu sebagai berikut :

5.2.1 Uji Asumsi Klasik

Model data panel yang terpilih adalah Fixed Effect Model yang menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dimana uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas saja. Berikut ini hasil uji asumsi klasiknya antara lain:

a. Uji Multikolinearitas

Suatu model regresi dikatakan terkena multikolinieritas bila terjadi hubungan linier yang sempurna (perfect) atau pasti (exact) di antara beberapa atau semua variabel

bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan. Uji ini dapat dikenali dengan melihat nilai korelasi diantara variable independent tersebut. Model regresi dianggap tidak mengalami masalah multikolinearitas jika nilai korelasi antar variabelnya kurang dari 0,80.

Tabel 5.5 Hasil Uji Multikolinearitas

	KM	INF	IPM
KM	1,000000	-0,040716	0,305918
INF	-0,040716	1,000000	0,231624
IPM	-0,305918	0,231624	1,000000

Sumber : Pengolahan data pada Eviews 10, (2024)

Hasil uji multikolinearitas pada table 5.5 menunjukkan nilai korelasi antar variable independent (konsumsi masyarakat, inflasi, dan indeks pembangunan manusia) kurang dari 0,80 dengan demikian tidak terdapat gejala multikolinearitas pada model regresi.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas ini merupakan pengujian yang menguji terkait adanya perbedaan pada varian dari residual pada keseluruhan pengamatan pada model regresi. Pengujian ini dapat dikerjakan dengan melakukan pengregresian pada nilai absolute residual dengan variable – variable independent dalam model. Berikut ini hasil pengujiannya :

Tabel 5.6 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1,088000	2,314953	-0,469988	0,6400
KM	-7,13E-10	3,18E-10	-1,298085	0,1991
INF	-0,059047	0,084437	-0,699299	0,4870
IPM	-0,051829	0,030398	1,705014	0,0932

Sumber : Pengolahan data pada Eviews 10, (2024)

Dari hasil uji heterokedastisitas pada Tabel 5.6 menunjukkan bahwa nilai prob setiap variable independennya lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 dengan demikian tidak terdapat gejala heterokedastisitas pada model regresi.

5.2.2 Pemilihan Model data Panel

Dalam data panel, terdapat tiga uji untuk menentukan model terbaik dalam pengujian dengan hasilnya sebagai berikut :

a. Uji chow

Pengujian ini mencoba untuk menentukan model manakah yang terbaik di antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* dalam melakukan pengestimasi data panel. Adapun pedoman dalam uji ini ialah jika nilai Probability F lebih besar dari a (0,05), maka model *Common Effect*. Sedangkan, jika nilai Probability F lebih kecil dari a (0,05), maka model *Fixed Effect*, hasil pengujian uji chow dapat dilihat pada Gambar 6 berikut ini:

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.551088	(10,63)	0.0000
Cross-section Chi-square	48.653991	10	0.0000

Sumber : Pengolahan data pada Eviews 10, (2024)

Gambar 7 Hasil Uji Chow

Hasil pengujian dari uji chow dapat dilihat pada nilai prob *cross section* Chi-Square yaitu 0,000 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga *Fixed Effect Model* merupakan model terbaik data panel, selanjutnya dilakukan uji hausman dalam memilih FEM atau REM sebagai model terbaik.

b. Uji Hausman

Pada Uji ini akan dilakukan pengujian dalam rangka menemukan model terbaik yang digunakan pada regresi data panel yaitu antara *Fixed Effect* ataupun *Random Effect*. Apabila nilai probability Chi-Square lebih besar dari a (0,05), maka model *Random Effect* yang terpilih. Sedangkan, jika nilai probability Chi-Square lebih kecil dari a (0,05), maka model *Fixed Effect* yang terpilih. Adapun hasil pengujiannya sebagai berikut :

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Equation: Untitled
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.292435	3	0.0403

Sumber : Pengolahan data pada Eviews 10 (2024)

Gambar 8 Hasil Uji Hausman

Nilai prob *Cross Section Random* yang dapat dilihat pada Gambar 5.2 sebesar 0,0403 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dengan demikian model terbaik yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*. Setelah melakukan pengujian uji chow dan uji hauman, *Fixed Effect Model* ditetapkan sebagai model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini sehingga tidak perlu dilakukan uji lagrange multiplier (pengujian untuk memilih antara REM dan CEM).

5.2.3 Hasil Perhitungan Dan Analisis Regresi Berganda Dengan Data Panel

a. Hasil dan Persamaan Regresi

Hasil pengolahan data pada software evIEWS dengan uji chow dan uji hausman menunjukkan bahwa model data panel yang digunakan adalah model FEM. Adapun hasil dari regresi data panel yaitu :

Tabel 5.7 Interpretasi Regresi Data Panel

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	104.9201	3.896919	26.92386	0,0000
KM	7.00E-10	7.71E-10	7.558516	0,0000
INF	0.176030	0.147107	1.196615	0,3227
IPM	-0.153682	0.074834	2.053647	0,0000

Sumber : Pengolahan data pada Eviews 10, (2024).

Berdasarkan hasil regresi data panel dengan melihat Tabel 5.7 dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :

$$PTK_{it} = \beta_0 + \beta_1 KM_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 IPM_{it} + e_{it}$$

$$PTK_{it} = 104.9201 + 0,0000000007KM_{it} + 0.176030INF_{it} + 0.153682IPM_{it} + e_{it}$$

b. Uji Parameter Regresi

Ketika model terbaik yang diperoleh telah memenuhi seluruh asumsi, selanjutnya dilakukan uji untuk mengetahui hipotesis model. Uji parameter regresi yang meliputi uji Simultan F, uji parsial t, dan koefisien determinasi.

1. Uji F

Pengujian ini dapat dilihat berdasarkan F-Statistik berdasarkan lebih besar atau kecilnya dari alpha 5% atau 0,05. Adapun pedoman yang digunakan dalam melakukan pengujian kali ini ialah apabila nilai probabilitas F-Statistik lebih kecil dari α , maka variable berpengaruh secara simultan. Hal ini berlaku juga sebaliknya, apabila nilai F-statisik lebih besar dari α maka variable tidak berpengaruh secara simultan.

Tabel 5.8 Hasil Uji F

F-statistic	Prob(F-statistic)
18,94025	0,000000

Sumber : Pengolahan data pada Eviews 10, (2024)

Nilai prob hasil uji F pada table 5.8 sebesar $0,0000 < 0,05$ dan nilai F-statistic nya sebesar $18,94025 > 2,730$ sehingga dapat diambil kesimpulan semua variabel independent (konsumsi masyarakat, inflasi, dan IMP) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya (penyerapan tenaga kerja)

2. Uji t

Pengujian ini terkait signifikansi pengaruh variabel bebas secara terpisah terhadap variabel terikat dan dengan asumsi variabel lain bersifat tetap. Adapun pedoman dalam melakukan uji ini ialah jika nilai signifikansi variabel lebih kecil dari α (0,05) maka secara individu variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui nilai dari Ttabel dengan taraf signifikansi 5% menggunakan

perhitungan $df1 = n-k$ dimana n iyalah jumlah observasi sebanyak 77 dan k iyalah semua variabel penelitian yaitu 4 variabel sehingga dapat diketahui $df1 = 77 - 4 = 73$ dengan melihat table nilai t maka nilai tabel sebesar 1,993. Hasil uji t dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.9 Hasil Uji t

No	Variabel	t-Statistic	Prob
1	Konsumsi Masyarakat	7.558516	0,0000
2	Inflasi	1.196615	0,3227
3	IPM	2.053647	0,0000

Sumber : Pengolahan data pada Eviews 10, (2024)

Jika dilihat dari hasil uji t pada Tabel 5.9 diketahui nilai p -value dan dari masing-masing variabel menunjukkan beberapa hal sebgai berikut :

- Nilai Prob Variabel Konsumsi Masyarakat lebih kecil dari α ($0,0000 < 0,05$) dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($7,558516 > 1,993$) dengan demikian variabel konsumsi masyarakat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja
- Nilai prob Variabel Inflasi lebih besar dari α ($0,3227 > 0,05$) dan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1.96615 < 1,993$) dengan demikian variabel inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
- Nilai prob Variabel IPM lebih kecil dari α ($0,0000 < 0,05$) dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2.053647 > 1,993$) dengan demikian variabel IPM mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa baik model regresi terestimasi dalam menentukan ketepatan model regresi. Koefisien determinasi menunjukkan proporsi atau persentase variasi variabel dependen yang dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel independen. Nilai koefisien determinasi

(R²) berada di rentang nol dan satu. Semakin mendekati satu, maka model regresi semakin baik.

Tabel 5.10 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

R- Squared	0,796264
Adjusted R-Squared	0,754223

Sumber : Pengolahan data pada Eviews 10, (2024)

Berdasarkan hasil pengujian dari regresi data panel dengan metode FEM yang menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi pada R-Squared sebesar 0,796264 atau sebesar 79% maka dapat diambil kesimpulan bahwa konsumsi masyarakat, inflasi, dan indeks pembangunan manusia dapat menjelaskan dengan baik terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 79% sedangkan 21% lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

c. Interpretasi Hasil Regresi

Berdasarkan hasil dan persamaan sebelumnya, dengan demikian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai konstantas sebesar 104.9201 yang artinya apabila asumsi konsumsi masyarakat, inflasi, dan IPM bernilai sama dengan nol maka penyerapan tenaga kerja akan bernilai sebesar 104.9201 persen
2. Nilai koefisien regresi variabel konsumsi masyarakat sebesar 7.00E-10 dan menjelaskan pengaruh positif konsumsi masyarakat terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya apabila konsumsi masyarakat mengalami kenaikan setiap 1 rupiah maka akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sebesar 0,0000000007 persen dengan asumsi variabel lainnya bernilai konstan atau tetap
3. Nilai koefisien regresi variabel inflasi sebesar 0.176030 dan menjelaskan pengaruh positif inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya apabila inflasi kenaikan setiap 1 persen maka akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sebesar 0.176030 persen dengan asumsi variabel lainnya bernilai konstan atau tetap

4. Nilai koefisien regresi variabel IPM sebesar 0.153682 dan menjelaskan pengaruh positif IPM terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya apabila IPM kenaikan setiap 1 maka akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sebesar 0.153682 persen dengan asumsi variabel lainnya bernilai konstan atau tetap.

Berdasarkan hasil estimasi data panel dengan model FEM, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai intersep pada 11 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi yang berarti setiap Kabupaten/Kota memiliki besaran penyerapan tenaga kerja yang beraneka ragam sesuai dengan nilai intersep dari masing-masing Kabupaten/kota. Adapun nilai konstanta efek individu pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebagai berikut :

Tabel 5.11 Efek Individu

Kabupaten/Kota	Koefisien	Efek Individu
Batang hari	0,2764525	105,1965375
Bungo	-1,0395304	103,8805546
Kerinci	1,9153423	106,8354273
Merangin	-0,5431239	104,3769611
Muaro Jambi	-1,4847117	103,4353733
Sarolangun	-0,5905200	104,3295650
Tanjung Jabung Barat	1,2862649	106,2063499
Tanjung Jabung Timur	2,2597839	107,1798689
Tebo	1,0566078	105,9766928
Jambi	-4,8484752	100,0716098
Sungai Penuh	1,7119097	106,6319947

Sumber : Pengolahan Data pada Eviews 10, (2024)

Berdasarkan table 5.11, dapat dilihat bahwa setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi menunjukkan nilai konstanta yang terhubung dengan faktor-faktor konsumsi masyarakat, inflasi dan indeks pembangunan manusia. Apabila variabel-variabel tersebut mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan berdampak pada tingkat

ketimpangan penyerapan tenaga kerja di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Berikut ini penjelasan mengenai nilai konstanta pada persamaan regresi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi yaitu :

1. Nilai Konstantan Kabupaten Batang Hari sebesar 105,1965375, Hal ini dapat diartikan bahwa setiap variabel konsumsi masyarakat, inflasi, dan indeks pembangunan manusia nilai nol atau tetap, maka penyerapan tenaga kerja akan mengalami peningkatan sebesar 105,1965375.
2. Nilai Konstantan Kabupaten Bungo sebesar 103,8805546, Hal ini dapat diartikan bahwa setiap variabel konsumsi masyarakat, inflasi, dan indeks pembangunan manusia nilai nol atau tetap, maka penyerapan tenaga kerja akan mengalami peningkatan sebesar 103,8805546.
3. Nilai Konstantan Kabupaten Kerinci sebesar 106,8354273, Hal ini dapat diartikan bahwa setiap variabel konsumsi masyarakat, inflasi, dan indeks pembangunan manusia nilai nol atau tetap, maka penyerapan tenaga kerja akan mengalami peningkatan sebesar 106,8354273.
4. Nilai Konstantan Kabupaten Merangin sebesar 104,3769611, Hal ini dapat diartikan bahwa setiap variabel konsumsi masyarakat, inflasi, dan indeks pembangunan manusia nilai nol atau tetap, maka penyerapan tenaga kerja akan mengalami peningkatan sebesar 104,3769611.
5. Nilai Konstantan Kabupaten Muaro Jambi sebesar 103,4353733, Hal ini dapat diartikan bahwa setiap variabel konsumsi masyarakat, inflasi, dan indeks pembangunan manusia nilai nol atau tetap, maka penyerapan tenaga kerja akan mengalami peningkatan sebesar 103,4353733.
6. Nilai Konstantan Kabupaten Sarolangun sebesar 104,3295650, Hal ini dapat diartikan bahwa setiap variabel konsumsi masyarakat, inflasi, dan indeks pembangunan manusia nilai nol atau tetap, maka penyerapan tenaga kerja akan mengalami peningkatan sebesar 104,3295650.
7. Nilai Konstantan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 106,2063499, Hal ini dapat diartikan bahwa setiap variabel konsumsi masyarakat, inflasi, dan indeks

pembangunan manusia nilai nol atau tetap, maka penyerapan tenaga kerja akan mengalami peningkatan sebesar 106,2063499.

8. Nilai Konstantan Kabupaten Tanjung jabung Timur sebesar 107,1798689, Hal ini dapat diartikan bahwa setiap variabel konsumsi masyarakat, inflasi, dan indeks pembangunan manusia nilai nol atau tetap, maka penyerapan tenaga kerja akan mengalam peningkatan sebesar 107,1798689.
9. Nilai Konstantan Kabupaten Tebo sebesar 105,9766928, Hal ini dapat diartikan bahwa setiap variabel konsumsi masyarakat, inflasi, dan indeks pembangunan manusia nilai nol atau tetap, maka penyerapan tenaga kerja akan mengalam peningkatan sebesar 105,9766928.
10. Nilai Konstantan Kota Jambi sebesar 100,0716098, Hal ini dapat diartikan bahwa setiap variabel konsumsi masyarakat, inflasi, dan indeks pembangunan manusia nilai nol atau tetap, maka penyerapan tenaga kerja akan mengalam peningkatan sebesar 100,0716098.
11. Nilai Konstantan Kota Sungai Penuh sebesar 106,6319947, Hal ini dapat diartikan bahwa setiap variabel konsumsi masyarakat, inflasi, dan indeks pembangunan manusia nilai nol atau tetap, maka penyerapan tenaga kerja akan mengalam peningkatan sebesar 106,6319947.

5.3 Hasil Pembahasan

5.3.1 Pengaruh Konsumsi Masyarakat Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil regresi data panel bahwa konsumsi masyarakat memperoleh nilai koefisien sebesar $7.00E-10$ dan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ yang menjelaskan bahwa setiap konsumsi masyarakat mengalami kenaikan 1 miliar rupiah maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,7 dengan asumsi variabel dianggap tetap, dengan demikian konsumsi masyarakat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2017-2023.

Hasil temuan ini konsisten dengan penelitian Kadir dkk., (2016) yang menyatakan bahwa konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Kota Kendari.

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Toossi (2002) yang menyatakan bahwa konsumsi mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja, dan diprediksi konsumsi akan menyumbang hampir 61 persen lapangan tenaga kerja di seluruh amerika serikat.

5.3.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil regresi data panel bahwa inflasi memperoleh nilai koefisien sebesar 0.176030 dan nilai probabilitas sebesar 0,3227 > 0,05 yang menjelaskan bahwa setiap inflasi mengalami kenaikan 1 persen maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,3327 dengan asumsi variabel dianggap tetap, dengan demikian konsumsi masyarakat memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2017-2023.

Hasil temuan ini konsisten dengan penelitian Ridho dkk., (2024) yang menyatakan bahwa tingkat inflasi yang kurang dari 10 persen dianggap moderat dan berdampak kecil terhadap lapangan kerja. Inflasi adalah salah satu indikator yang penting dalam pengendalian ekonomi makro karena memiliki dampak yang luas di berbagai sektor perekonomian. Tingginya tingkat inflasi dapat merugikan perekonomian karena dengan adanya inflasi dapat melemahkan daya beli masyarakat yang berdampak pada turunnya tingkat konsumsi. Akibat dari menurunnya tingkat konsumsi dapat berdampak pada melambatnya perkembangan produksi.

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Nanga, (2005) yang menyatakan Inflasi yang terjadi pada perekonomian di suatu daerah memiliki beberapa dampak dan akibat yang diantaranya adalah inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan output dan tenaga kerja, dengan cara memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukannya, tergantung intensitasi inflasi yang terjadi. Apabila inflasi dirasa cukup tinggi maka akan mengakibatkan

tingkat harga yang tinggi dan menyebabkan tingkat konsumsi menjadi rendah, hal ini akan mengakibatkan produsen menurunkan tingkat produksinya, dan mengakibatkan berkurangnya permintaan akan tenaga kerja, hal ini akan berakibat terhadap menurunnya penyerapan tenaga kerja.

Hasil temuan ini juga konsisten dengan penelitian Mulyo Pambagyo dkk., (2024) variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, dan variabel di Pulau Jawa tahun 2011-2022.

5.3.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil regresi data panel bahwa IPM memperoleh nilai koefisien sebesar -0.153682 dan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ yang menjelaskan bahwa setiap IPM mengalami kenaikan 1 maka akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.153682 dengan asumsi variabel dianggap tetap, dengan demikian IPM memiliki pengaruh yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2017-2023.

Hasil temuan ini bertolak belakang dengan teori human capital yang dikemukakan oleh Gary S. Becker, yang menyatakan pendidikan dan pelatihan yang merupakan faktor penting dalam pengembangan sumber daya manusia karena tidak saja menambah pengetahuan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja sehingga meningkatkan produktivitas kerja. Hubungan pendidikan dengan produktivitas kerja dapat tercermin dalam tingkat penghasilan. Rendahnya tingkat kesehatan disebabkan oleh rendahnya tingkat penghasilan yang tercermin dalam tingkat upah dan pengeluaran rumah tangga yang rendah.

Namun penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kalsum & Faisal Fadli, 2024) yang menyatakan IPM berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini terjadi dikarenakan daya tampung atau permintaan tenaga kerja terbatas. Terkadang lapangan kerja tidak sesuai dengan pendidikannya artinya tingginya Pendidikan tidak sesuai keahlian yang dibutuhkan perusahaan, hal ini

mengakibatkan adanya pengangguran yang mencerminkan sumber daya manusia yang tinggi tidak terserap oleh pasar tenaga kerja.

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangesti & Prawoto (2018) yang menyatakan bahwa IPM memiliki pengaruh yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan di Jawa Timur.

5.4 Implikasi Penelitian

Penyerapan tenaga kerja merupakan topik yang dalam analisis ekonomi dan pembuatan kebijakan publik. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek ekonomi dan sosial termasuk konsumsi masyarakat, inflasi, dan indeks pembangunan manusia. Adapun implikasi kebijakan yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

5.4.1 Pengendalian Konsumsi Masyarakat

Konsumsi masyarakat merupakan aspek dalam menentukan banyaknya kegiatan produksi yang akan dilakukan oleh perusahaan dan berapa banyak tenaga kerja yang akan dibutuhkan. Upaya pengendalian konsumsi masyarakat dapat dilakukan dengan upaya mengendalikan inflasi kelompok volatile food dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan dengan fokus utama adalah pada komoditas seperti beras, cabai, dan bawang. Selain itu, dapat juga dengan upaya ketahanan pangan dengan cara meningkatkan produktivitas dan hilirisasi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan. Ini termasuk program-program seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Dapat dilihat di tabel 5.1, program GNPIP berhasil memberikan dampak positif terhadap konsumsi masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam jangka pendek dengan cara menstabilkan harga pangan dan memperkuat daya beli masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, untuk mencapai dampak jangka panjang yang berkelanjutan, keberhasilan gerakan ini harus didukung oleh kebijakan yang lebih luas, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan infrastruktur distribusi pangan, dan kebijakan ketahanan pangan yang

lebih komprehensif. Peningkatan pada konsumsi masyarakat tersebut juga memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Toossi (2002) yang menyatakan bahwa konsumsi mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja, dan diprediksi konsumsi akan menyumbang hampir 61 persen lapangan tenaga kerja di seluruh amerika serikat.

5.4.2 Pengendalian Tingkat Inflasi

Pengendalian tingkat inflasi merupakan aspek yang dapat menjaga tingkat konsumsi masyarakat agar tidak terlalu tinggi yang akan menyebabkan harga barang dan jasa menjadi sangat tinggi. Pemerintah dapat mengatur pengeluaran dan pendapatan negara melalui kebijakan fiskal. Misalnya, meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk proyek infrastruktur atau memberikan subsidi untuk menstabilkan harga barang-barang penting. Salah satu kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah dalam mengendalikan tingkat inflasi adalah transfer sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan pangan sering digunakan untuk mendukung daya beli masyarakat, terutama dalam situasi inflasi tinggi.

Pada tabel 5.2, dapat dilihat bahwa upaya pemerintah untuk mengendalikan tingkat inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi melalui transfer sosial seperti BLT berhasil untuk menstabilkan tingkat inflasi. Namun, kestabilan tingkat inflasi tersebut tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridho dkk., (2024) yang menyatakan bahwa tingkat inflasi yang kurang dari 10 persen dianggap moderat dan berdampak kecil terhadap lapangan kerja. Inflasi adalah salah satu indikator yang penting dalam pengendalian ekonomi makro karena memiliki dampak yang luas di berbagai sektor perekonomian. Tingginya tingkat inflasi dapat merugikan perekonomian karena dengan adanya inflasi dapat melemahkan daya beli masyarakat

yang berdampak pada turunnya tingkat konsumsi. Akibat dari menurunnya tingkat konsumsi dapat berdampak pada melambatnya perkembangan produksi.

5.4.3 Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi pengangguran. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, pelayanan Kesehatan yang terjangkau, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program-program yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu program yang dilakukan untuk meningkatkan IPM adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan di Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat dengan cara menghubungkan bantuan sosial dengan kewajiban pendidikan dan kesehatan.

Pada tabel 5.3, dapat dilihat bahwa IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang berarti PKH yang dilakukan pemerintah berhasil untuk meningkatkan IPM. PKH memberikan bantuan uang tunai kepada keluarga miskin, dengan syarat anak-anak dalam keluarga harus bersekolah dan memeriksakan kesehatan secara rutin. Program ini juga membantu masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dengan meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak, yang berperan penting dalam meningkatkan harapan hidup dan angka partisipasi sekolah—dua komponen penting dalam IPM. Sayangnya, peningkatan IPM ini malah berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Hal sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kalsum & Faisal Fadli, 2024) yang menyatakan IPM berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini terjadi dikarenakan daya tampung atau permintaan tenaga kerja terbatas. Terkadang lapangan kerja tidak sesuai dengan pendidikannya artinya tingginya pendidikan tidak sesuai keahlian yang dibutuhkan perusahaan.